



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR KM 54 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENGGUNAAN SEMENTARA TERMINAL KHUSUS
PT. BARADINAMIKA MUDASUKSES DI DESA MALINAU KOTA,
KECAMATAN MALINAU KOTA, KABUPATEN MALINAU,
PROVINSI KALIMANTAN UTARA UNTUK MELAYANI KEPENTINGAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pada wilayah Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara terdapat kegiatan yang memerlukan fasilitas terminal untuk kegiatan bongkar muat barang hasil pertambangan batubara, dimana Pelabuhan Tarakan sebagai pelabuhan umum terdekat tidak dapat melayani permintaan jasa kepelabuhanan untuk kegiatan dimaksud oleh karena keterbatasan kemampuan fasilitas yang tersedia;
- b. bahwa sesuai hasil penelitian terhadap fasilitas terminal khusus pertambangan batubara PT. Baradinamika Mudasukses telah memenuhi persyaratan dari aspek teknis untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran dan pelaksanaan pelayanan jasa kepelabuhanan, sehingga terminal khusus dimaksud layak digunakan untuk melayani kepentingan umum yang bersifat sementara;

c. bahwa ...

5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5109);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
8. Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1980 tentang Pengesahan *International Convention for The Safety of Life at Sea 1974*;
9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
10. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 76 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1183);

12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756);
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 20 Tahun 2017 tentang Terminal Khusus dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 394);
14. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor BX-460/PP.008 tanggal 8 September 2015 tentang Pemberian Izin Pembangunan dan Pengoperasian Terminal Khusus Pertambangan Batubara Kepada PT. Baradinamika MudasukSES di Desa Malinau Kota, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PEMBERIAN IZIN PENGGUNAAN SEMENTARA TERMINAL KHUSUS PT. BARADINAMIKA MUDASUKSES DI DESA MALINAU KOTA, KECAMATAN MALINAU KOTA, KABUPATEN MALINAU, PROVINSI KALIMANTAN UTARA UNTUK MELAYANI KEPENTINGAN UMUM.

PERTAMA : Memberikan izin penggunaan terminal khusus pertambangan batubara PT. Baradinamika MudasukSES di Desa Malinau Kota, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara yang dioperasikan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor BX-460/PP.008 tanggal 8 September 2015, untuk digunakan sementara melayani kepentingan umum bongkar muat barang pertambangan batubara di wilayah Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara.

KEDUA : ...

- KEDUA : Izin penggunaan terminal khusus PT. Baradinamika Mudasukses untuk melayani kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA berlaku dengan jangka waktu selama 1 (satu) tahun.
- KETIGA : Penggunaan terminal khusus PT. Baradinamika Mudasukses untuk melayani kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, pengoperasiannya dilakukan oleh PT. Baradinamika Mudasukses bekerjasama dengan Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Tarakan.
- KEEMPAT : Penggunaan terminal khusus PT. Baradinamika Mudasukses untuk melayani kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, wajib dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran guna menjamin keselamatan pelayaran, kelancaran, keamanan dan ketertiban dalam pelayanan jasa kepelabuhanan.
- KELIMA : Tarif jasa kepelabuhanan pada terminal khusus PT. Baradinamika Mudasukses selama digunakan melayani kepentingan umum, ditetapkan sesuai dengan tarif jasa kepelabuhanan yang berlaku pada pelabuhan yang diselenggarakan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Tarakan.
- KEENAM : Direktur Jenderal Perhubungan Laut melakukan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap penggunaan sementara terminal khusus PT. Baradinamika Mudasukses untuk melayani kepentingan umum.

KETUJUH : ...

KETUJUH : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 825 Tahun 2014 tanggal 29 September 2014 tentang Penggunaan Sementara Terminal Khusus PT. Baradinamika Mudasukses di Desa Malinau Kota, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara untuk Melayani Kepentingan Umum, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Februari 2019

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman;
2. Menteri Pertahanan;
3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
5. Menteri Perindustrian;
6. Menteri Perdagangan;
7. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
8. Kepala Staf Angkatan Laut;
9. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan;
10. Gubernur Kalimantan Utara;
11. Bupati Malinau;
12. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Tarakan;
13. Direksi PT. Baradinamika Mudasukses.

Salinan sesuai dengan aslinya

KAPALA BIRO HUKUM



WAHJU ADJI H., SH, DESS
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19651022 199203 1 001